

PENGARUH PT PERKEBUNAN TAMBI UNIT TANJUNGSARI TERHADAP SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DESA SEDAYU KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 1958-1996

Oleh: Bagas Maulana Rizki, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, bagasmaulanarizki@gmail.com

Abstrak

Perkebunan merupakan aspek yang penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia pada masa kolonial dan berlangsung lebih dari satu abad. Awal munculnya perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa kolonialisme. Perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo muncul karena adanya politik cultuurstelsel yang di berlakukan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1830. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo mengalami perkembangan yang sangat pesat, sedangkan pada masa pendudukan Jepang perkebunan teh tersebut mengalami kemunduran karena digantinya tanaman teh dengan tanaman pangan sebagai penunjang kebutuhan perang tentara Jepang. Sejarah perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo juga muncul akibat dari Resolusi 18 Oktober 1834 oleh Pemerintah Kolonial Belanda tentang pengusahaan teh di wilayah Wonosobo. Kabupaten Wonosobo dipilih karena mempunyai iklim dan suhu udara yang pas bagi tumbuhnya tanaman teh. Awal perkembangan perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo Pemerintah Kolonial terus menerus mengalami kerugian akhirnya menyewakan perkebunan mereka kepada N. V Bagelen Thee & Kina Maatschappij. Setelah terjadi proses nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1954, pengelolaan industri diserahkan kepada PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan pekerjaan dan perbaikan infrastuksur Desa Sedayu.

Kata Kunci: PT Perkebunan Tambi, Wonosobo, Sosial-Ekonomi

THE INFLUENCE OF PT PERKEBUNAN TAMBI TANJUNGSARI TOWARDS SOCIO-ECONOMIC OF SOCIETY IN SEDAYU WONOSOBO IN 1958 to 1996

Abstract

Plantation is an important aspect in supporting the economy in Indonesia during the colonial era and lasted more than a century. The begining of the plantation in Indonesia cannot be separated from the colonialism. Tea plantation in Wonosobo arises due to the Cultuurstelsel Politics which is imposed by Dutch colonialism in 1830. During the Dutch colonialism, tea plantation in Wonosobo grows rapidly while during the Japanese colonialism era, the tea plantation decreases due to the replacemtmof tea plant with crops to fulfill the needs of Japanese soldiers during World War II. The history of tea plantation in Wonosobo also emerged as a result of the Resolution in October 1835 by the Dutch on tea exploitation in Wonosobo area. Wonosobo is chosen because it has a good climate and temperature that is appropriate for the growth of tea plant. In early development of tea plantation in Wonosobo, The Dutch suffers from losses so that The Dutch leases the tea plantations to N. V Bagelen Thee and Kinaa Maatschappij. After the nationalization by Indonesia government in 1954, industrial management was handed over to PPN (State Plantation Company) which gave a direct impact on the availability of job vacancy and the restoration of the infrastructure in Sedayu Village.

Keywords: PT Perkebunan Tambi, Wonosobo, Socio-Economic.

PENDAHULUAN

Perkebunan teh merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di area perkebunan teh. Tanaman teh (*Camelia Sinensis*) pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684 berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang Jerman bernama Andreas Cleyer. Tanaman teh pertama kali ditanam bukan sebagai tanaman perkebunan, melainkan sebagai tanaman hias di halaman rumah Gubernur Jenderal VOC, Johannes Camphuys di Batavia (Jakarta). Pada tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam melengkapi koleksi di Kebun Raya Bogor, dan pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisarupan, Garut, Jawa Barat.¹

Perkebunan teh di Wonosobo mulai muncul sejak adanya politik *cultuurstelsel* yang diberlakukan pemerintah Kolonial Belanda yang menjadikan tanaman teh menjadi salah satu tanaman wajib. Latar belakang lain munculnya perkebunan teh di Wonosobo atau yang dulu dikenal dengan nama Bagelen sangat cocok sebagai tempat budidaya tanaman teh. Selain itu munculnya perkebunan teh di Wonosobo juga akibat perluasan komoditi teh yang telah di uji coba di Kebun Raya Bogor.²

Usaha pemerintah Kolonial Belanda untuk memperbanyak tanaman teh memakan banyak

biaya dan mengalami banyak kesulitan termasuk perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo. Kondisi perkebunan di Kabupaten Wonosobo pada saat itu jauh dari kata baik bahkan kondisi perkebunan saat itu terkesan memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya produksi teh sedangkan ongkosnya lebih tinggi. Awal berkembangnya perkebunan teh di Kabupaten masih menggunakan biji teh dari Cina yang lambat laun mulai diganti dengan jenis teh Assam dari India tahun 1902.³

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil alih dan memperbaiki usaha perkebunan dan industri teh. Walaupun luasannya tidak mencapai keadaan sebelum perang tetapi produksinya meningkat tajam. Setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada November 1949, pemerintah Indonesia harus mengembalikan perkebunan milik asing termasuk perkebunan teh di Wonosobo.⁴

Tahun 1954 *Bagelen Thee & Kina Maatschappij* selaku pemilik perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo menjual perkebunan tersebut yang meliputi unit perkebunan teh Tambi, unit perkebunan teh Bedakah, dan unit perkebunan teh Tanjungsari kepada NV. Eks PPN Sindoro Sumbing karena kondisi perusahaan yang tidak menentu.⁵

METODE PENELITIAN

¹Ita Setiawati dan Nasikun, *Teh: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 10.

²Tim Penulis Penebar Swadaya, *Pembudidayaan dan Pengolahan Teh*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1993), hlm. 4.

³Margono, *Sejarah PT NV Tambi*, (Wonosobo: Direksi, 1995), hlm. 14.

⁴Soebandi, *Sejarah Singkat PT NV Perusahaan Perkebunan Tambi Tahun 1942 s.d. 1958*, (Wonosobo: Direksi, 1997), hlm. 1.

⁵*Ibid.*, hlm. 36.

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.⁶

Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi.⁷ Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data, atau materi sejarah. Tahap selanjutnya kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapan ini sering dijadikan pemicu subjektivitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶Helius Syamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

A. Perkembangan Perkebunan Teh Di Kabupaten Wonosobo Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

1. Perkembangan Perkebunan Teh Di Wonosobo Masa Kolonial Belanda

Awal mula pengusahaan pembudidayaan tanaman teh di Kabupaten Wonosobo pada masa Kolonial Belanda proses produksinya belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat terjadi karena pada awal pembudidayaan tanaman teh mengalami banyak kesulitan karena minimnya pengetahuan dalam budidaya tanaman teh. Usaha pemerintah Kolonial Belanda bisa dikatakan belum berhasil dalam pembudidayaan tanaman teh karena mutu hasil produksi masih belum baik sedangkan biaya produksinya mahal.

Tahun 1839 biaya untuk produksi 0,5 kg teh adalah *f.* 1,17 sedangkan harga jualnya di Amsterdam untuk 0,5kg teh adalah *f.* 0,81. Oleh karena itu pemerintah Kolonial Belanda selama tahun 1835-1840 mengalami kerugian besar yaitu sekitar *f.* 300.000,-. Tahun 1946 menjadi *f.* 500.000, dan pada tahun 1860 kerugiannya kira-kira mencapai *f.* 6.000.000,-. Pemerintah Kolonial Belanda terus mengalami kerugian maka atas saran Menteri Jajahan, pemerintah kolonial berangsur-angsur menghentikan pembudidayaan teh.⁸ Dampak dari kerugian yang berangsur-angsur ini banyak perkebunan teh yang dihapus dan disewakan pada pihak swasta.

Pada tahun 1864 perkebunan milik pemerintah Kolonial Belanda di daerah Bagelen

⁷Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

⁸Margono, *op. cit.*, hlm. 10.

(Wonosobo) disewakan pada D Van der Sluij untuk unit perkebunan Tanjungsari dan W de Jong untuk perkebunan unit Tambi dan Bedakah. Perjanjian jual beli itu dilaksanakan di kantor Residen Bagelen pada hari Selasa 20 Desember 1864. Inti dari kesepakatan tersebut adalah D Van der Sluijs harus membayar sebesar *f.* 42,25 setiap *bau* dengan jumlah harga keseluruhan *f.* 7.338,80 dan W de Jong harus membayar *f.* 32.50 dan *f.* 45,50 setiap *bau* dengan jumlah harga keseluruhan *f.* 15.403,65. Harga uang sewa setiap tahun yang harus dibayar untuk tiga kebun tersebut adalah *f.* 22.741,75. Pada bulan Maret 1865 perkebunan di daerah Bagelen Wonosobo diberi nama “*Ledokache Theetuinen*” yang disewakan pada D Van der Sluij dan W de Jong. Perkebunan-perkebunan tersebut kemudian dibeli oleh Mr MP Van Den Berg, A W Hoile dan Ed Yacobson yang kemudian mendirikan “*Bagelen Thee & Kina Maatschaappij*”.⁹

Tanah-tanah sewa diganti dengan hak *erfpacht* pada tahun 1870 setelah keluarnya *Agrarisch Wet* atau yang dikenal dengan Undang-Undang Agraria (UUA) untuk waktu 75 tahun. Tanah-tanah dari perkebunan *Bagelen Thee & Tina Maatschaappij* menjadi tanah *erfpacht* pada saat tahun berdirinya.¹⁰

Pengolahan *Bagelen Thee & Tina Maatschaappij* diserahkan kepada *Firma John Peet & co* yang berkantor di Jakarta. John Peet mempunyai pengetahuan persyaratan dan cara-cara pengolahan teh yang akhirnya

kemampuannya tersebut kepada pengusaha-pengusaha teh di daerah Jawa. Teh jenis Assam dari India mulai didatangkan pada tahun 1872 karena teh jenis ini dapat hidup dengan baik dan lebih tahan lama. Lambat laun teh jenis Assam mulai menggantikan tanaman teh dari Cina dan Jepang yang sudah ada sebelumnya.¹¹

Kondisi perkebunan di Karisidenan Bagelen pada waktu itu jauh dari kata baik, bahkan kondisinya terkesan miskin dan memperhatikan, yang sangat berlainan dengan perkebunan di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Jika dilihat budidaya dan pengolahan teh di Cikajang dan Bagelen boleh dikatakan sama. Harga teh dari Cikajang dan Bagelen sama akan tetapi teh dari Cikajang memperoleh harga yang lebih tinggi di Amsterdam. Oleh sebab itu perkebunan teh di Cikajang mengalami keuntungan sedangkan dperkebunan teh di Bagelen mengalami kerugian. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya produksi teh di perkebunan Bagelen sedangkan biaya produksinya lebih tinggi.

Tahun 1879 didatangkan mesin-mesin penggulung oleh JILL Jacobson dan langsung berdampak positif pada perbaikan pengolahan teh. Hal ini juga didukung oleh digantinya teh dari Cina dengan teh jenis Assam dari India. Perbaikan pemetikan daun teh juga dilakukan yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh mandor. Pada akhirnya produksi teh dan mutu teh dapat

⁹Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 165.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 190.

¹¹James J. Spillane, *Komoditi Teh: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 32.

terus ditingkatkan dan mampu bersaing di pasar dunia. Atas keberhasilannya ini kemudian W P Bakhoven diangkat menjadi adimistratur kepala di perkebunan teh Bagelen Wonosobo.¹²

Setelah teknik budidaya teh dapat diperbaiki dan pasaran teh meningkat mendorong penanaman dan perluasan perkebunan teh yang pada akhirnya masyarakat kelibihan hasil produksi teh yang justru membuat harga teh menjadi turun. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1932 diadakan persetujuan antara para produsen teh dari India, Srilanka dan juga Indonesia untuk mengadakan pembatasan atau perjanjian *retriksi* produksi dan ekspor teh pada 9 Febuari 1933. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat memperbaiki harga teh di pasar dunia. Dalam perjanjian ini ditentukan beberapa banyaknya teh yang diperdagangkan ke luar negeri tiap tahunnya untuk masing-masing negara yang mengikuti perjanjian. *Bagelen Thee & Tina Maatschaappij* hanya dapat mengekspor 80% dari total jumlah produksinya, selebihnya 20% digunakan untuk pupuk kebun atau dibakar.¹³

2. Perkembangan Perkebunan Teh di Wonosobo Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan jepang banyak hal yang terjadi di perkebunan teh maupun pada kehidupan masyarakat. Pada umumnya tanaman teh tidak dirawat dengan baik. Tanaman teh banyak yang di bongkar dan diganti dengan tnaman lain seperti *pyrethrum*, ketela, ubi jalar, pisang, jagung, gandum, jarak, iles-iles, sobra,

dan tanaman bahan pangan lainnya. Pada tahun 1943 dikeluarkan keputusan SKK yang berisi penyerahan sebanyak 30 perusahaan perkebunan teh kepada perusahaan sandang. Maksud dari penyerahan tersebut adalah bahwa perusahaan sandang diperintahkan untuk mengembangkan tanman rami atau *boehmeria nivea* sebagai bahan untuk membuat karung. Para pegawainya mendapat jarak berupa beras kecil-kecil sebanyak 10 kg tiap orang untuk tiap bulan yang kemudian hari diganti dengan jagung dan ketela. Untuk tenaga kerja harian diberi jatah bekatul dan jagung.¹⁴

Dampak dari pembongkaran tanaman teh tersebut adalah dikuasainya lahan bekas tanaman polowijo dan tanaman non-teh lainnya oleh rakyat sekitar. Pada saat itu masyarakat yang haus akan kekuasaan tanah menyerbu masuk ke perkebunan teh. Di *Afdeeling* Bedakah wilayah Desa Kledung yang semula di kanan-kiri jalan merupakan perkebunan teh telah habis dibabat dan dikuasai penduduk hingga sekarang. Demikian juga lahan perkebunan teh di Desa Reco, Desa Pagerotan, di dekat Bukit Surodilogo juga habis dikuasai oleh masyarakat sekitarnya. Beberapa petak di perkebunan teh Bedakah dan Jurang Jero ternyata masih ada batang teh yang tersisa dan tumbuh lagi. Petak tanman teh di Kaliurip, Penjor, dan Di Gunung Kembang juga masih utuh karena terletak di wilayah lereng gunung.

Keadaan *Afdeeling* Tanjungsari sebagian besar areal yang terletak di sebelah timur jalan

¹²Margono, *op. cit.*, hlm. 20.

¹³*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴Soegijanto Padmo, *op. cit.*, hlm. 182.

masih dalam keadaan utuh dan tetap dikuasai oleh *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij*. Emplasemen¹⁵ Tanjungsari dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang sebagai penjara untuk menampung para kriminal. Mereka dipaksa menanam tanaman pangan dan tanaman lain yang diperlakukan oleh pemerintah Jepang. Sedangkan keadaan *Afdeeling Tambi* sedikit berbeda. Di perkebunan ini meskipun tanaman teh banyak yang dibabat tetapi lahannya tidak ada yang dikuasai oleh rakyat. Kebun teh yang ada di Tlogo seperti kebun Kreo, Serengsari, Tambi dan Sikatok tetap berada dalam penguasaan *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij*. Hanya saja perkebunan di Sikatok yang diubah menjadi *pyrethrum*.¹⁶

Pada masa pendudukan Jepang perkebunan teh di Wonosobo tiap kebun dipimpin oleh satu hingga dua orang Jepang. Untuk Unit Perkebunan Tambi dipimpin oleh Sawabi dan Segara. Adapun asisten-asisten orang Indonesia adalah Dasro Soewignyo, Romo Seno, Soekarno dan Kartosoewarno. Di kebun Tambi ini hanya tanaman teh yang di bongkar dan diganti dengan tanaman lain seperti *pyrethrum*.

Unit Perkebunan Bedakah dipimpin oleh Ishihara dan Ono. Asisten-asisten orang Indonesia yang membantu adalah Soepangkat dan Soebandi. Sama yang terjadi di Kebun Tambi, tanaman teh di kebun ini juga banyak

yang dibongkar dan beberapa juga ditelantarkan. Tanaman teh yang dibongkar diganti dengan tanaman palawija yang ditanam oleh rakyat dan akhirnya rakyat menjadi lepas dari penguasaan *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* seluas 74 ha.

Untuk unit Tanjungsari lain lagi perkembangannya. Sejak kedatangan tentara Jepang tahun 1942 sampai akhir pemerintahan Jepang, pabrik dan perkebunannya dijadikan penjara. Pada tahun 1948 kebun tanjungsari dikembalikan dari Dinas kepenjaraan kepada perusahaan perkebunan. Unit Perkebunan Tanjungsari dipimpin oleh Tanaka dan Murrata yang dibantu asisten dari Indonesia yaitu Koesnadi, Soetardi, R Soekardi. Di kebun ini hanya sedikit saja tanaman teh yang diganti dengan tanaman palawija.¹⁷

B. Perkembangan Perkebunan Teh Di Kabupaten Wonosobo Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelum pecahnya Perang Dunia II, Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak dalam ekspor teh di seluruh dunia. Teh yang di ekspor tersebut dihasilkan oleh kebun-kebun milik perusahaan besar, milik rakyat, maupun perkebunan kecil milik pemerintah. Jenis teh hitam (*black tea*) merupakan hasil komoditi perkebunan milik perusahaan besar di Indonesia untuk di ekspor. Sebaliknya untuk jenis teh hijau hasil kebun-kebun teh rakyat praktis seluruhnya

¹⁵Emplasemen merupakan tempat terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk jawatan atau satuan bangunan. Lihat, Buku Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 299.

¹⁶Soegijanto Padmo, *op. cit.*, hlm 182-183.

¹⁷Melina Ika Purwati, "Nasionalisasi Perkebunan Teh Di Wonosobo 1950-1960", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2009, hlm. 40.

di pasarkan di pasar domestik. Perkebunan teh di Indonesia sebagian besar masih dimiliki oleh perusahaan Belanda yang berkantor di Amsterdam atau Rotterdam. Pusat pemasarannya juga dilakukan melalui pelelangan-pelangan di Amsterdam maupun di Rotterdam.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka terdapat banyak hal yang harus dibenahi khususnya dalam bidang perkebunan. Rusaknya perkebunan akibat dari pecahnya Perang Dunia II mengakibatkan perusahaan perkebunan yang terarah pada ekspor dan ketergantungan pada pasar dunia, mau tidak mau mengalami kemunduran karena terjadi kemerosotan produksi komoditi perkebunan. Hal ini juga berdampak pada perusahaan perkebunan teh Wonosobo yang telah kehilangan pasar untuk mengekspor komoditi teh.

Keadaan ini diperparah dengan adanya revolusi fisik seperti Agresi militer I tahun 1947 dan Agresi Militer II tahun 1958. Keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi perkebunan khususnya perkebunan teh di Wonosobo yang mengakibatkan turunya jumlah produksi teh. Setelah revolusi fisik berakhir Republik Indonesia harus menghadapi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan antara lain seperti mewarisi keuangan federal dengan defisit besar, kecenderungan inflasi kuat, bahkan tidak seimbang antara ekspor dan impor. Hal ini disebabkan oleh proses pemulihan perkebunan yang berjalan lambat dan selama perang Indonesia telah kehilangan sebagian besar pasarannya sebelum perang. Kemerosotan

produksi inilah yang kemudian mendukung untuk segera mengejar ketertinggalan atau memulihkan pasaran dunia.¹⁹

Tahun 1950 pemerintah republik Indonesia menghadapi masalah untuk memfungsionalkan kembali perkebunan-perkebunan yang ada. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh pendapatan negara, menata kembali urusan tanah dan tenaga kerja sehingga dapat menarik investasi modal dalam perusahaan perkebunan. Usaha yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia guna melaksanakan pemulihan perkebunan didasarkan atas beberapa faktor sebagai berikut:

1. Memperbaiki kerusakan yang diderita suatu perkebunan terutama mengenai modal dan juga alat-alat perlengkapannya.
2. Menyiapkan modal yang digunakan untuk mengoperasikan lagi perkebunan-perkebunan yang kerusakannya berat.
3. Mengangalisa lahan perkebunan yang telah dipergunakan oleh penduduk setempat bagi penanaman bahan makanan.
4. Menyiapkan ganti rugi yang dituntut oleh badan atau organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan.
5. Meminimalisir pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar perkebunan yang

¹⁸James J. Spillane, *op. cit.*, hlm. 41.

¹⁹Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial*

Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media,1991), hlm. 163.

dapat mengganggu penyelenggaraan perkebunan.

6. Mengambil kembali lahan yang diduduki rakyat secara liar (*wilde occupatie*).²⁰

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa dampak besar bagi perkembangan perkebunan teh di Indonesia khususnya perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo. Perkebunan teh di Wonosobo yang semula milik perusahaan asing dengan nama *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari tiga unit perkebunan yaitu Unit Perkebunan Tambi, unit Perkebunan Bedakah, dan Unit Perkebunan Tanjungsari. Dalam hal ini yang bertindak adalah Pusat Perkebunan Nasional (PPN) yang berkantor di Kota Surakarta. Para tenaga kerja diangkat menjadi pegawai perkebunan negara dengan kantor perwakilan di Kota Magelang.

Tahun 1949 terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan agenda acara penyerahan kedudukan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Para tentara Belanda yang masih berada di Indonesia ditarik dan dipulangkan ke negara asalnya sehingga tercipta keadaan yang betul-betul aman. Sejalan dengan kesepakatan yang terjadi di KMB, semua perusahaan milik Belanda dikembalikan pada pemilik aslinya termasuk perkebunan teh Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari yang dikembalikan kepada pemilik semula yaitu *Bagelen Thee & Kina*

Maatschaappij.²¹ Dampak lain dari perjanjian KMB adalah semua karyawan PPN dinonaktifkan oleh Menteri kemakmuran dan kemudian lahirlah kelompok eks pegawai PPN.

Para eks pegawai PPN kemudian membentuk Kantor Perkebunan Gunung dan berkantor di Hotel Merdeka Wonosobo. Para eks pegawai PPN mulai mengusahakan kembali kebun tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Artinya meskipun pemilik lama perkebunan yang ada di Belanda belum datang untuk meninjau perusahaan mereka yang ada di Indonesia, para eks pegawai PPN memanfaatkan perusahaan tersebut sebagaimana yang sudah mereka lakukan selama ini dan juga mengerjakan sesuatu agar perkebunan tersebut bisa beroperasi kembali dengan memanfaatkan waktu yang ada.²²

Pada tahun 1950 pemilik *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* mengutus Croll dan Steincallenfels datang ke Wonosobo untuk meninjau perkebunan teh yang ada di Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari. Mereka berkeliling di kebun-kebun tersebut dan diantar oleh Bambang Wibowo. Menurut Croll dan Steincallenfels kondisi perkebunan saat itu sudah sangat parah. Untuk memperbaiki perusahaan dalam kondisi saat itu diperlukan dua hal yaitu modal yang besar dan perpanjangan *erfpacht*. Untuk penambahan modal yang besar tidak jadi masalah bagi pemilik perusahaan untuk memperolehnya namun dari segi perhitungan ekonomis sangat dipertanyakan mengingat keadaan harga teh di pasar dunia sangat tidak

²⁰*Ibid.*, 166-167.

²¹Soegijanto Padmo, *op. cit.*, hlm. 187.

²²*Ibid.*, hlm. 189.

menentu. Untuk pertimbangan perpanjangan *erfpacht* juga masih belum jelas dikarenakan untuk memperoleh perpanjangan *erfpacht* sangat dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.²³

Hasil peninjauan Croll dan Steincallefels kemudian dilaporkan kepada pengurus *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij*. Pada tahun 1951 para pengurus *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* melakukan rapat yang dilaksanakan di Belanda dan diputuskan bahwa perusahaan akan menjual perkebunan teh yang ada di Wonosobo. Keputusan ini diambil karena untuk mengusahakan perusahaan tersebut diperlukan modal besar dan modal tersebut saat itu tidak tersedia. Keputusan kedua bahwa situasi politik di Indonesia masih belum menentu maka perkebunan teh yang ada di Wonosobo unit Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari tidak dilakukan perpanjangan hak *erfpacht*.

Kementerian Kemakmuran berpendapat bahwa perkebunan teh di Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari sebaiknya diusahakan oleh rakyat yang dalam hal ini adalah eks pegawai PPN. Gagasan Kementerian Kemakmuran memperoleh sambutan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah dimana pada bulan Juni 1952 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AGR. 36/1952/6/11/24.

Pihak *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* berniat untuk menjual perkebunannya kepada pihak lain yang pada akhirnya perkebunan tersebut di serahkan kepada para eks pegawai PPN. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan selama perkebunan

tersebut terbengklai, para eks pegawai PPN lah yang menjaga dan mengelola perkebunan dengan alat seadanya sehingga perkebunan terpelihara dan masih dapat menjalankan proses produksi. Para eks pegawai PPN kemudian mendirikan suatu badan hukum dengan nama Yayasan Eks. Pegawai PPN. Pihak *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* kemudian menyerahkan ketiga perkebunan tersebut yaitu perkebunan Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari kepada Yayasan Eks. Pegawai PPN dengan surat pernyataan pelepasan hak atas kebun-kebun tersebut di atas segel Rp. 3,- di Jakarta tanggal 29 April 1954.

Untuk memperkuat kedudukan hukum dari penyerahan ketiga perkebunan tersebut maka didirikanlah maskapai oleh para eks pegawai PPN dengan nama NV Eks PPN Sindoro Sumbing atas saran dari Departemen Kemakmuran. Maskapai tersebut memperoleh status kuat sebagai badan hukum dengan Akta Notaris di Magelang Nomor 17 tanggal 17 mei 1954. Sebagai badan hukum NV Eks PPN Sindoro Sumbing berkedudukan di Wonosobo.

Setelah terbentuknya NV Eks PPN Sindoro Sumbing terjadilah perjanjian jual beli antara *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* dengan NV Eks PPN Sindoro Sumbing atas perkebunan Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari di Jakarta tanggal 26 November 1954 Nomor 1156. Dalam perjanjian jual beli tersebut telah disepakati bahwa pengalihan hak kebun teh milik *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* kepada NV Eks PPN Sindoro Sumbing dilakukan pembayaran secara simbolis yaitu dengan uang sebesar Rp. 1,-.²⁴ Demikian telah resmi

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 193.

perubahan status dari ketiga perkebunan tersebut dari semula dalam penguasaan *Bagelen Thee & Kina Maatschaappij* menjadi dalam NV Eks PPN Sindoro Sumbing. Ketiga unit perkebunan tersebut meliputi Unit Perkebunan Tambi, Unit Perkebunan Bedakah, dan Unit Perkebunan Tanjungsari.²⁵

C. Dampak Sosial-Ekonomi Perkebunan Teh Di Kabupaten Wonosobo Terhadap Masyarakat Desa Sedayu Tahun 1958-1996

1. Dampak Sosial

Keberadaan PT Perkebunan Tambi ternyata telah menimbulkan dampak positif dalam pembangunan perkebunan yaitu:

- a. Meningkatkan fungsi guna tanah negara
- b. Meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak
- c. Menciptakan ekosistem yang positif
- d. Penyerapan produksi dalam negeri
- e. Terlaksananya alih teknologi
- f. Meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat
- g. Kelestarian sumber daya alam dan sumber daya manusia

Dampak positif adanya perkebunan teh di Wonosobo khususnya PT Perkebunan Tambi Unit Tanjungsari lingkungan disekitar perkebunan ikut terjaga kelestariannya. Masyarakat Desa Sedayu akan sangat diuntungkan dengan adanya perkebunan teh ini seperti kesuburan tanah yang terjaga, pengamanan sumber mata air, kebersihan udara dan lingkungan yang sejuk. Secara tidak

langsung dengan terjaganya lingkungan yang ditimbulkan dari adanya perkebunan teh akan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Desa Sedayu.

Perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo memiliki perjalanan panjang dalam pengelolaannya, juga mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif bagi masyarakat sekitar yaitu adanya kemajuan di bidang sosial dengan dibangunnya poliklinik, pembangunan sarana olahraga, dan transportasi serta infrastruktur perkebunan.

2. Dampak Ekonomi

Hak Guna Usaha seluas 209.2950 Ha yang dimiliki PT Perkebunan Tambi Unit Tanjungsari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain untuk mengolah tanah, memelihara tanaman teh, proses panen daun teh, hingga proses pengolahan daun teh hingga siap dipasarkan dan juga di konsumsi. Sebagian besar tenaga kerja PT Perkebunan Tambi unit Tanjungsari berasal dari masyarakat Desa Sedayu yang meliputi laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang bekerja sesuai bidang dan keahliannya.²⁶ Adanya PT Perkebunan Tambi Unit Tanjungsari tentu membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan.

a. Peningkatan Pendapatan Penduduk

PT Perkebunan Tambi Unit Tanjungsari memiliki tiga blok perkebunan teh yaitu blok Gelatik, blok Murai, dan blok Kutilang. Setiap blok perkebunan terdapat tanaman pelindung

²⁵Soebandi, *op. cit.*, hlm. 60-62.

²⁶Soebandi, *op. cit.*, hlm. 62.

teh tetap yaitu pohon saman, dan tanaman pelindung teh sementara yaitu trembesi dan manis jangan. Untuk memetik daun teh agar dapat diolah ke tahap selanjutnya, satu blok perkebunan membutuhkan 46 buruh pemetik teh yang terdiri dari perempuan dewasa.

Penghasilan yang diperoleh buruh pemetik daun teh yang dibantu oleh anaknya dalam 5-6 jam kerja perhari bisa memperoleh pucuk teh sebanyak 40 kg hingga 60 kg. Upah untuk tiap kg pucuk daun teh yang dapat dikumpulkan adalah Rp 350,00. Upah ini bisa mereka ambil setelah penimbangan pucuk teh selesai atau bisa diambil seminggu sekali, bahkan bisa diambil sebulan sekali. Setiap buruh pemetik teh memiliki upah yang berbeda-beda tergantung berapa banyak teh yang dapat mereka kumpulkan. Sebagian besar pendapatan yang mereka peroleh dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan tersebut biasanya berupa kebutuhan pangan. Para buruh pemetik teh biasanya mulai berkangkat ke perkebunan sehabis subuh, karena pucuk teh terbaik hanya bisa didapatkan pada waktu pagi hari.

b. Fasilitas Kesejahteraan Untuk Karyawan

Seiring perkembangan usaha untuk meningkatkan produksi PT Perkebunan Tambi maka fasilitas penunjang untuk kesejahteraan karyawan juga harus ditingkatkan. Beberapa fasilitas yang diberikan oleh PT Perkebunan Tambi terhadap karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pensiun bagi karyawan tetap.
2. Pembayaran *onderstand* kepada mantan pekerja harian tetap.
3. Pembayaran santunan atau pesangon pada waktu putusnya hubungan kerja.
4. Pembayaran bantuan pengobatan.
5. Pembayaran bantuan Pendidikan.
6. Pembayaran tunjangan cuti bagi karyawan tetap.
7. Perumahan bagi karyawan tetap.
8. Jamsostek bagi karyawan tetap.
9. Tunjangan hari raya keagamaan.
10. Santuan kematian.

c. Pendirian Koperasi

PT Perkebunan Tambi juga memiliki sebuah badan usaha yang digunakan untuk mensejahterakan para pekerjanya yaitu koperasi pada setiap unit perkebunannya. Koperasi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja yang ingin memenuhi kebutuhannya sehari-harinya. Koperasi di PT Perkebunan Tambi juga dapat memberikan pinjaman berupa uang kepada para tenaga kerja perkebunan yang menjadi anggota koperasi tersebut. Koperasi ini tidak hanya beranggotakan para tenaga kerja yang bekerja diperkebunan, melainkan masyarakat sekitar perkebunan juga dapat menjadi anggota koperasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Kesimpulan

Kabupaten Wonosobo mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat dan mengalami jumlah peningkatan pada setiap tahunnya. Penduduk Kabupaten Wonosobo sebagian besar merupakan etnik Jawa yang

menjadikan mereka memiliki rasa solidaritas dan jiwa gotong royong yang kuat. Mayoritas penduduk di Kabupaten Wonosobo berprofesi sebagai petani, karena wilayah di Kabupaten Wonosobo yang merupakan dataran tinggi dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi sangat cocok untuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam menopang perekonomian penduduk di Kabupaten Wonosobo.

Melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Wonosobo tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda berminat untuk membudidayakan tanaman teh di 14 lokasi di Jawa termasuk Wonosobo yang tertuang dalam Resolusi 18 Oktober 1834. Sebagai realisasi dari rencana tersebut JILL Jacobson selaku Inspektur Budi Daya Teh mendatangkan biji teh dari Cina. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membudidayakan tanaman teh secara besar-besaran disebabkan karena komoditi teh sangat laku di pasar dunia.

Perkebunan teh yang ada di Kabupaten wonosobo telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda perkebunan teh di Kabupaten Wonosobo merupakan tanah milik *Bagelen Thee & Kina Maatschappij*, yang didirikan oleh Mr MP Van Den Berg, A W Hoile dan Ed Yacobson. Pengolahan dan pengurusan perkebunan teh tersebut diserahkan kepada *Firma John Peet & Co* yang berkedudukan di Jakarta. *Bagelen Thee & Kina Maatschappij* mempunyai tiga unit perkebunan yang tersebar di Kabupaten Wonosobo yaitu Unit Perkebunan Tambi, Unit

Perkebunan Bedakah, dan Unit Perkebunan Tanjungsari.

Pada masa pendudukan Jepang perkebunan ini diambil alih oleh pemerintah Jepang dan sebagian tanaman teh diganti dengan tanaman pangan lain seperti ubi jalar, pisang, jagung, sobra, dan *pyrethrum* guna memenuhi kebutuhan perang tentara Jepang. Pabrik-pabrik pengolahan teh dialih fungsikan menjadi bangunan penjara dan kebun teh banyak yang tidak terpelihara yang mengakibatkan produktivitas menurun.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 maka perkebunan teh yang ada di Kabupaten Wonosobo diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah pengawasan dari Pusat Perkebunan Negara (PPN) yang berkantor di Surakarta. Karyawan yang bekerja yang semula bekerja di perkebunan tersebut diangkat menjadi pegawai perkebunan negara dengan kantor perwakilan di Magelang, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada November 1949, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang sebelumnya sudah diakui sebagai milik negara, harus diserahkan kembali kepada pemilik semula termasuk perkebunan teh yang ada di Kabupaten Wonosobo. Melihat kondisi perkebunan yang sudah rusak parah akibat konflik antar golongan pasca kemerdekaan, pihak *Bagelen Thee & Kina Maatschappij* tidak berminat untuk mengurus perkebunan tersebut. Pihak *Bagelen Thee & Kina Maatschappij* kemudian menjual perkebunannya kepada para eks pegawai PPN yang saat itu bernama NV Eks

PPN Sindoro Sumbing. Perjanjian jual beli antara Bagelen Thee & Kina Maatschappij dan NV Eks PPN Sindoro Sumbing terjadi pada tanggal 26 November 1954 atas perkebunan Tambi, Bedakah, dan Tanjungsari. Untuk memudahkan koordinasi antar unit perkebunan dan untuk memudahkan kerjasama dengan relasi perusahaan, maka kantor direksi di bangun di pusat Kota Wonosobo tepatnya di jalan Tumenggung Jogonegoro No. 39 Wonosobo. Setiap perkebunan ditempatkan kantor perwakilan yang mempunyai hak otonomi untuk mengurus setiap unit perkebunan.

Berdirinya PT Perkebunan Tambi di Kabupaten Wonosobo dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar perkebunan seperti contoh masyarakat Desa Sedayu. Masyarakat Desa Sedayu diuntungkan dengan adanya perkebunan teh unit Tanjungsari milik PT Perkebunan Tambi, karena dapat bekerja di perkebunan baik sebagai buruh harian maupun karyawan tetap untuk menambah pemasukan. Dampak positif lainnya dengan adanya perkebunan teh di Wonosobo khususnya PT Perkebunan Tambi Unit Tanjungsari lingkungan disekitar perkebunan ikut terjaga kelestariannya. Masyarakat Desa Sedayu akan sangat diuntungkan dengan adanya perkebunan teh ini seperti kesuburan tanah yang terjaga, pengamanan sumber mata air, kebersihan udara

dan lingkungan yang sejuk. Secara tidak langsung dengan terjaganya lingkungan yang ditimbulkan dari adanya perkebunan teh akan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Desa Sedayu.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya PT Perkebunan Tambi bagi masyarakat Desa Sedayu relatif kecil. Hal ini disebabkan karena hubungan yang telah terjalin antara perusahaan dan para tenaga kerja sangat baik. Dampak negatif yang terjadi pada masyarakat Desa Sedayu bukan berasal dari perusahaan perkebunan teh melainkan dari lingkungan masyarakat itu sendiri, contoh munculnya kriminalitas di areal perkebunan dan statifikasi sosial yang baru. Tindak kriminal di areal perkebunan biasanya berupa pencurian daun teh kering siap panen yang dikarenakan kurangnya penjagaan dari pihak perkebunan. Munculnya statifikasi sosial yang baru diakibatkan karena peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tentu akan diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat yang kuat sehingga menjadikan masyarakat menjadi konsumtif. Hal tersebut berdampak pada kelas sosial pada masyarakat antara kelas ekonomi menengah ke atas dan kelas ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djoehana Setyamidjaja, *Teh, Budi Daya dan Pengolahan Pascapanen*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : UI Press, 1985.

Helius Syamsudin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Herawati W. D., *Teknik Budi Daya Tanaman Teh*, Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2013.

Ita Setiawati dan Nasikun, *Teh: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani di Sumatera 1947-1959*, terj. Bosko Carvallo Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.

Margono, *Sejarah PT NV Tambi*, Wonosobo: Direksi, 1994.

Melina Ika Purwati, "Nasionalisasi Perkebunan Teh Di Wonosobo 1950-1960", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2009.

Mubyarto, *Tanah Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Rahmat Rukmana, *Untung Selangit Dari Agribisnis Teh*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2015.

Sartono Kartodirjo dan Djoko Surjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Siswoputranto, P. S., *Perkembangan Teh, Kopi, Cokelat Internasional*, Jakarta: PT Gramedia, 1978.

Soebandi, *Sejarah Singkat PT NV Perusahaan Perkebunan Tambi tahun 1942 s.d. 1958*, Wonosobo: Direksi, 1997.

Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 2004.

Spillane, James, *Komoditi Teh: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Supardi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suhartono, W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Tim Penulis Penebar Swadaya, *Pembudidayaan dan Pengolahan Teh*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.

Yogyakarta, 8 April 2018

Dosen Pembimbing TAS

Reviewer

Dina Dwikurniarini, M.Hum
NIP.19571209 19872 2 001

Ririn Darini, M.Hum
NIP.19741118 199903 2 001